

BAB III

SAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan akan dijelaskan secara rinci tentang hasil penelitian jenis-jenis pelanggaran Etika Pariwara Indonesia iklan baris produk Lembaga pendidikan dan Lowongan Kerja koran Tribun Jogja edisi April 2019. Di dalam iklan tersebut banyak ditemuat pelanggaran Erika Pariwara Indonsia seperti menggunakan kalimat berbentuk janji memperoleh pekerjaan dan penghasilan tertentu, menggunakan kalimat yang menjanjikan imbalan secara berlebihan, dan diskriminasi terhadap suku, jenis kelamin, agama, dan budaya, tanpa secara khas menjelaskan syarat tersebut tersebut yang harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait.

Selain itu, dalam bab III ini dijelaskan secara rinci jenis-jenis pelanggaran Etika Pariwara Indonesia melalui uji reliabilitas dengan maksud untuk mengetahui persentase persetujuan. Seperti yang diperkenalkan oleh Holsty, reliabilitas ditunjukkan dalam persentase persetujuan. Berdasarkan ujia reliabilitas yang dilakukan, reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya, jika hasil perhitungan menunjukkan angka reliabilitas di atas 0,7 atau 70%, maka penelitian dikatakan valid atau bisa diterima sebagai kepercayaan, tetapi, jika di bawah angka 0,7, atau 70% maka penelitian ini tidak valid (Eriyanto, 2011: 290).

Tes uji reliabilitas dilakukan terhadap seluruh populasi yang menjadi sampel yaitu pelanggaran Etika Pariwara Indonesia dalam iklan baris produk lembaga pendidikan dan lowongan kerja yang telah dituangkan dalam unit analisis pada bagian unit pencatatan. Tes uji reliabilitas dilakukan setelah

sampel yang menjadi bahan penelitian tersebut dikoding oleh para *coder* yaitu *coder 1* dan *coder 2* yang dihasilkan dalam bentuk lembar koder.

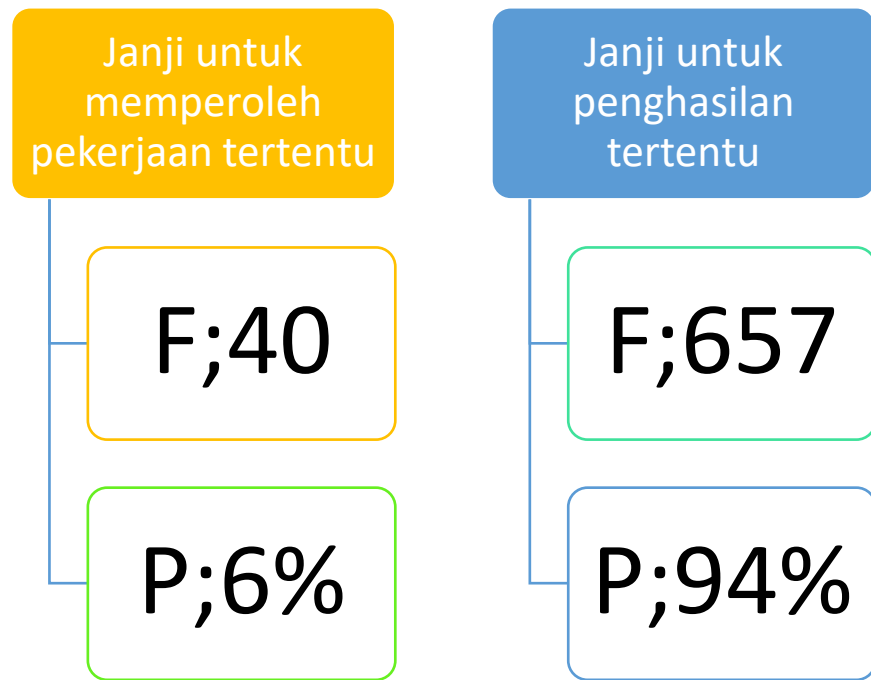
Sampel sendiri diambil dari seluruh populasi dalam iklan baris Lembaga pendidikan dan Lowongan Kerja yang melanggar EPI selama satu bulan yaitu bulan April 2019. Jumlah sampel yang menjadi bahan penelitian dalam skripsi ini sebanyak 739 dari 1540 jumlah keseluruhan populasi dan ditemukan sebanyak 2.024 pelanggar EPI yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu Iklan lembaga pendidikan tidak boleh mengandung janji untuk memperoleh pekerjaan atau penghasilan tertentu sebanyak 697 iklan baris pada lembaga pendidikan dan lowongan kerja, Iklan lowongan kerja tidak boleh secara berlebihan menjanjikan imbalan yang akan diperoleh sebanyak 557 iklan baris produk lembaga pendidikan dan lowongan kerja, Iklan lowongan kerja tidak boleh memberi indikasi adanya diskriminasi atas suku, jenis kelamin, agama, atau ras tertentu, kecuali jika secara khusus menyertakan alasan dibutuhkannya suku, jenis kelamin, agama, atau ras tertentu tersebut sebanyak 770 iklan baris produk lembaga pendidikan dan lowongan kerja.

A. Objektivitas Iklan Produk/Jasa Lembaga Pendidikan Dan

Lowongan Kerja

1. Iklan lembaga pendidikan dan lowongan kerja tidak boleh mengandung janji untuk memperoleh pekerjaan atau penghasilan tertentu.

Gambar 3.1 Frekuensi mengandung Janji untuk memperoleh pekerjaan atau penghasilan tertentu.

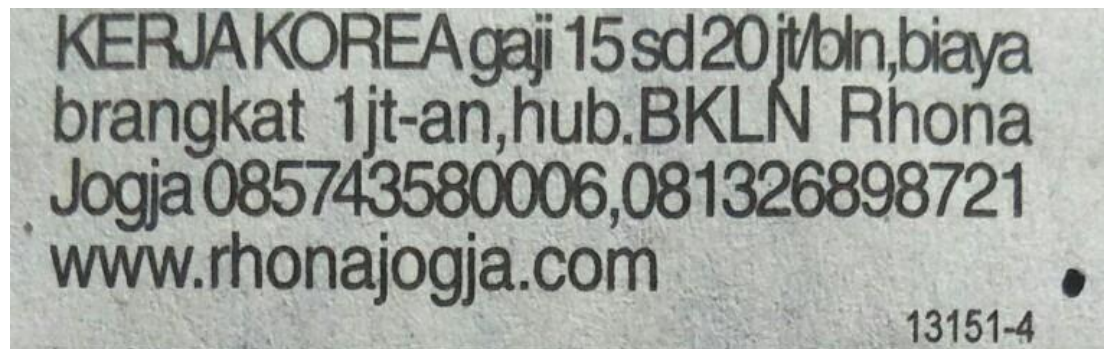


Sumber: Data primer 2019

Berdasarkan gambar 3.1 dengan F sebagai frekuensi dan P sebagai persentase, dapat diketahui bahwa lembaga pendidikan dan lowongan kerja dalam Surat Kabar Harian Tribun Jogja lebih banyak melakukan pelanggaran tidak boleh mengandung janji untuk memperoleh pekerjaan atau penghasilan tertentu dengan frekuensi sebanyak 697 dan persentase terbesar yaitu mengandung janji penghasilan tertentu sebesar 94,26% dari frekuensi sebanyak 657 dan mengandung janji untuk memperoleh pekerjaan tertentu sebesar 5,73% dari frekuensi sebanyak 40.

Adapun contoh iklan baris lembaga pendidikan dan lowongan kerja yang melanggar Etika Pariwisata Indonesia dalam Surat Kabar Harian Tribun Jogja edisi April 2019 dengan mengandung janji untuk memperoleh penghasilan tertentu yaitu “KERJA KOREA gaji 15 sd 20

jt/bln, biaya berangkat 1jt-an, hub.BKLN Rhona Jogja
085743580006,081326898721 www.rhonajogja.com".



Gambar 3.2 Contoh Iklan mengandung janji untuk memperoleh penghasilan tertentu

Adapun contoh iklan baris lembaga pendidikan dan lowongan kerja yang melanggar Etika Pariwisata Indonesia dalam Surat Kabar Harian Tribun Jogja edisi April 2019 dengan mengandung janji untuk memperoleh pekerjaan tertentu yaitu "Approving 18tng kerja Australia, proses 3bln, max 50th, gaji 30jt, bhs Ing pasif. 081904282837".



Gambar 3.3 Contoh Iklan mengandung janji untuk memperoleh pekerjaan tertentu

2. Iklan lowongan kerja tidak boleh secara berlebihan menjanjikan imbalan yang akan diperoleh.

Gambar 3.4 Frekuensi secara berlebihan menjanjikan imbalan yang akan diperoleh.



Sumber: Data primer 2019

Berdasarkan gambar 3.4 dengan F sebagai frekuensi dan P sebagai persentase, dapat diketahui bahwa lembaga pendidikan dan lowongan kerja dalam Surat Kabar Harian Tribun Jogja lebih banyak melakukan pelanggaran secara berlebihan menjanjikan imbalan yang akan diperoleh dengan frekuensi sebanyak 557 dan persentase 100%.

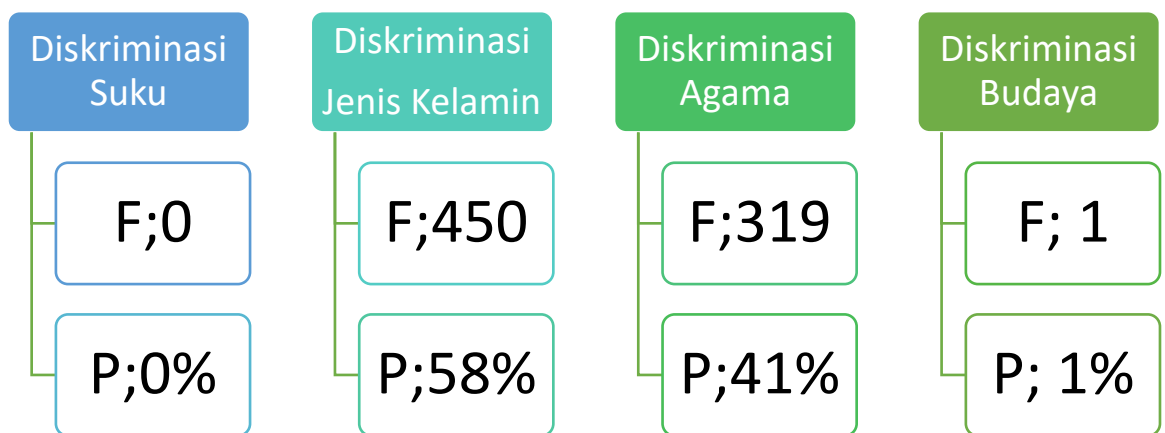
Adapun contoh iklan baris lembaga pendidikan dan lowongan kerja yang melanggar Etika Pariwisata Indonesia dalam Surat Kabar Harian Tribun Jogja edisi April 2019 dengan secara berlebihan menjanjikan imbalan yang akan diperoleh yaitu "Tnp Biaya Krja diKapal ikan Bali. SyrtPria Max40th KTP KK Pghsln 20-30Jt/Kntrk085786744625".



Gambar 3.5 Contoh Iklan secara berlebihan menjanjikan imbalan yang akan diperoleh

3. Iklan lowongan kerja tidak boleh memberi indikasi adanya diskriminasi atas suku, jenis kelamin, agama, atau ras tertentu, kecuali jika secara khusus menyertakan alasan dibutuhkannya suku, jenis kelamin, agama, atau ras tertentu tersebut.

Gambar 3.6 Frekuensi adanya diskriminasi atas suku, jenis kelamin, agama, atau ras tertentu



Sumber: Data primer 2019

Berdasarkan gambar 3.6 dengan F sebagai frekuensi dan P sebagai persentase, dapat diketahui bahwa lembaga pendidikan dan lowongan kerja dalam Surat Kabar Harian Tribun Jogja lebih

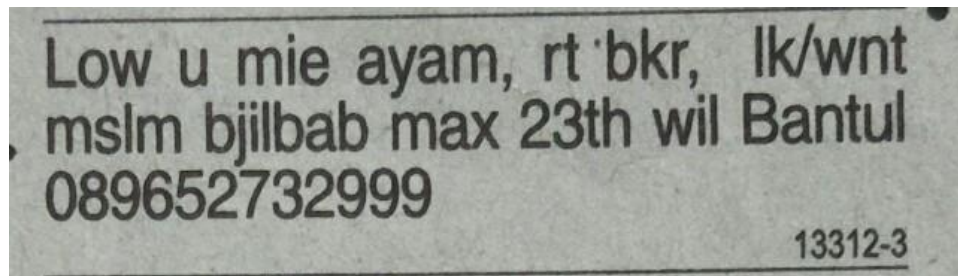
banyak melakukan pelanggaran secara berlebihan adanya diskriminasi atas suku, jenis kelamin, agama, atau ras tertentu dengan frekuensi sebanyak 770 yaitu diskriminasi terhadap jenis kelamin sebesar 58,4% dengan frekuensi 450, Diskriminasi terhadap agama sebesar 41,4% dengan frekuensi 319 dan diskriminasi terhadap budaya sebesar 1% dengan frekuensi 1.

Adapun contoh iklan baris lembaga pendidikan dan lowongan kerja yang melanggar Etika Pariwisata Indonesia dalam Surat Kabar Harian Tribun Jogja edisi April 2019 dengan indikasi diskriminasi terhadap jenis kelamin yaitu “Dcr pengantar Ulat Hongkong. Gaji awal 1JT. Pria maks 35 thn. Lokasi Sleman. CP 081329658944 ”.



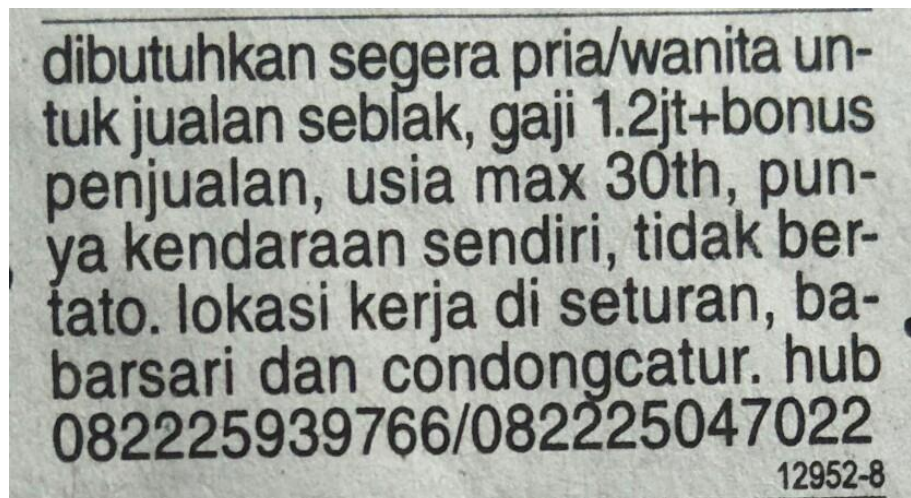
Gambar 3.7 Contoh Iklan dengan indikasi diskriminasi terhadap jenis kelamin

Adapun contoh iklan baris lembaga pendidikan dan lowongan kerja yang melanggar Etika Pariwisata Indonesia dalam Surat Kabar Harian Tribun Jogja edisi April 2019 dengan indikasi diskriminasi terhadap agama yaitu “Low u mie ayam, rt bkr, lk/wnt mslm bjilbab max 23th wil Bantul 089652732999”.



Gambar 3.8 Contoh Iklan dengan indikasi diskriminasi terhadap agama

Adapun contoh iklan baris lembaga pendidikan dan lowongan kerja yang melanggar Etika Pariwisata Indonesia dalam Surat Kabar Harian Tribun Jogja edisi April 2019 dengan indikasi diskriminasi terhadap budaya yaitu “dibutuhkan segera pria/wanita untuk jualan seblak, gaji 1.2jt+bonus penjualan, usia max 30th, punya kendaraan sendiri, tidak bertato. lokasi kerja di seturan, babarsari dan condongcatur. hub 082225939766/082225047022”.



Gambar 3.9 Contoh Iklan dengan indikasi diskriminasi terhadap Budaya

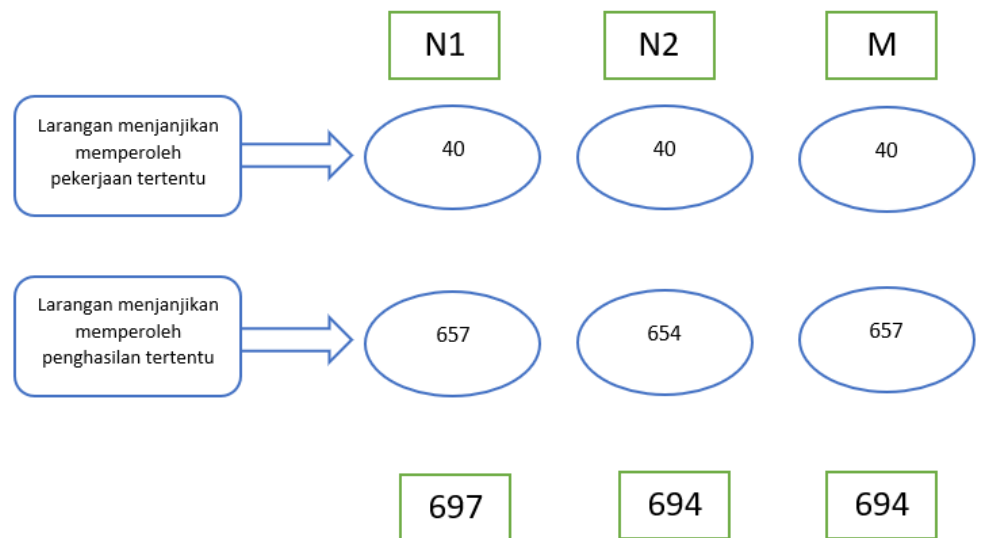
B. Sajian Data Objektivitas Surat Kabar Harian Tribun Jogja

Dalam sajian data ini dibuat gambar infografis objektivitas pelanggaran Etika Pariwisata Indonesia iklan baris lembaga pendidikan dan lowongan kerja dalam Surat Kabar Harian Tribun Jogja pada edisi April 2019. Di dalam gambar ini berisi angka-angka dari hasil koding antara

pengkode 1 (N1) dan pengkode 2 (N2) dan M yang merupakan angka-angka yang telah disepakati oleh pengkode 1 (N1) dan pengkode 2 (N2) yang nantinya akan diteliti dan di analisis setelah dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan Formula Holsty pada pembahasan berikutnya. Setelah pengkode 1 (N1) dan pengkode 2 (N2) melakukan koding maka, didapatkan hasil objektivitas pelanggaran Etika Pariwisata Indonesia dalam iklan baris lembaga pendidikan dan lowongan kerja di Surat Kabar Harian Tribun Jogja pada edisi April 2019 seperti pada gambar berikut ini:

1. Sajian data pelanggaran EPI berdasarkan Iklan lembaga pendidikan dan lowongan kerja tidak boleh mengandung janji untuk memperoleh pekerjaan atau penghasilan tertentu.

Gambar 3.10 Objektivitas kalimat mengandung janji untuk memperoleh pekerjaan atau penghasilan tertentu



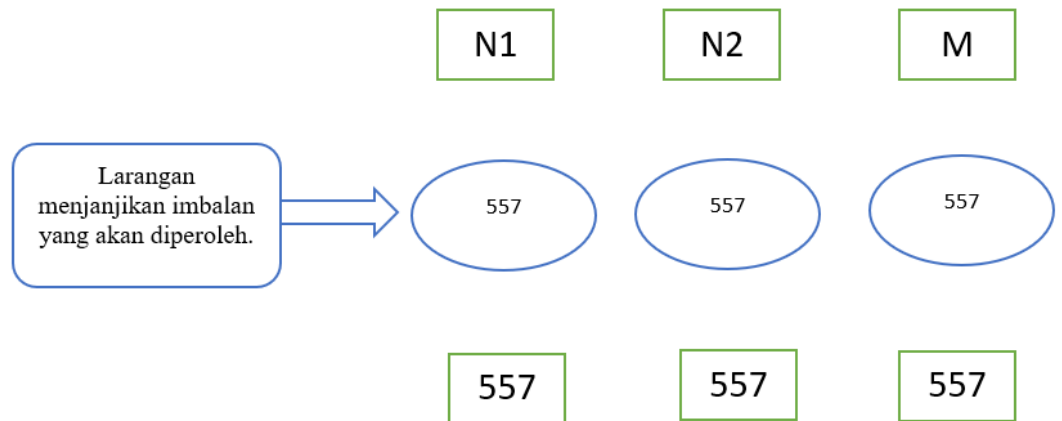
Sumber: Data Primer 2019

Hasil data pelanggaran iklan baris produk lembaga pendidikan dan lowongan kerja dalam koran Tribun Jogja menunjukkan bahwa

pelanggaran Etika Pariwara Indonesia penggunaan kalimat mengandung janji untuk memperoleh penghasilan tertentu merupakan pelanggaran paling banyak ditemui yaitu sebanyak 697 dari keseluruhan 711 iklan. Diikuti dengan penggunaan kalimat mengandung janji untuk memperoleh pekerjaan tertentu yaitu sebanyak 40 dari keseluruhan 711 iklan

2. Sajian data pelanggaran EPI berdasarkan Iklan lowongan kerja tidak boleh secara berlebihan menjanjikan imbalan yang akan diperoleh.

Gambar 3.11 Objektivitas kalimat secara berlebihan menjanjikan imbalan yang akan diperoleh



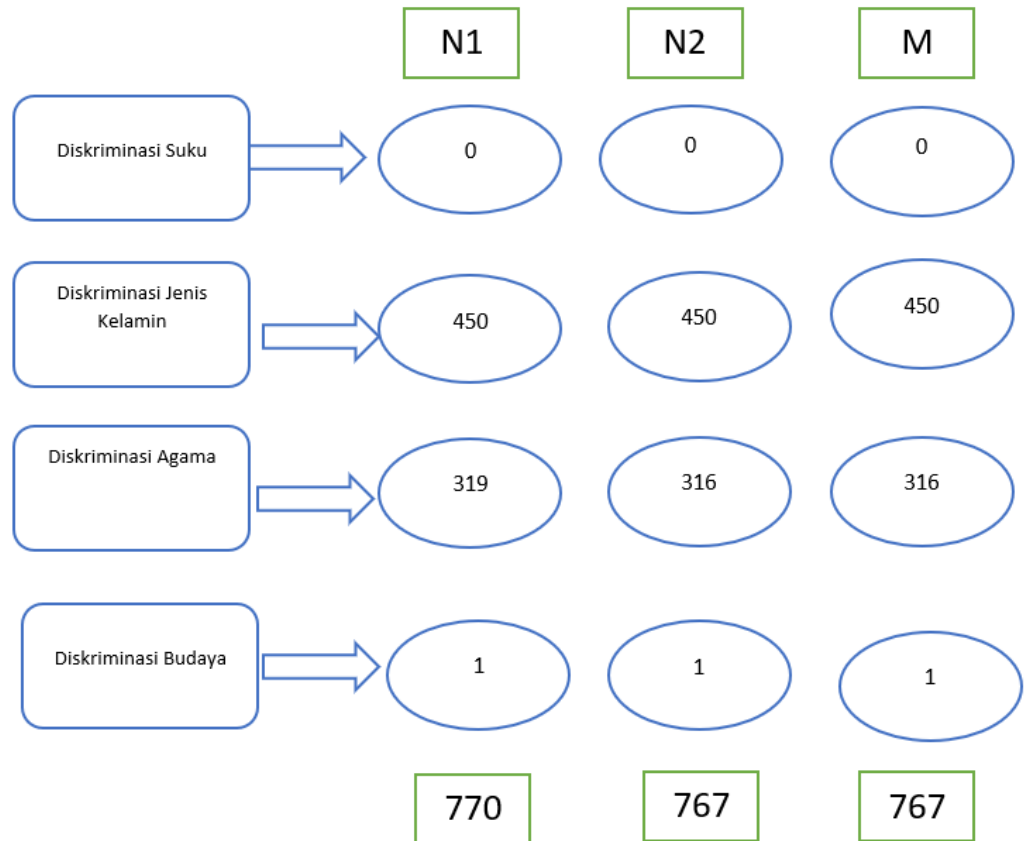
Sumber: Data Primer 2019

Hasil data pelanggaran iklan baris produk lembaga pendidikan dan lowongan kerja dalam koran Tribun Jogja menunjukkan bahwa pelanggaran Etika Pariwara Indonesia penggunaan kalimat secara berlebihan menjanjikan imbalan yang akan diperoleh merupakan pelanggaran paling banyak ditemui yaitu sebanyak 557 dari keseluruhan 713 iklan baris di Surat Kabar Harian Tribun Jogja.

3. Sajian data pelanggaran EPI berdasarkan Iklan lowongan kerja tidak boleh memberi indikasi adanya diskriminasi atas suku, jenis kelamin,

agama, atau ras tertentu, kecuali jika secara khusus menyertakan alasan dibutuhkannya suku, jenis kelamin, agama, atau ras tertentu tersebut.

Gambar 3.12 Objektivitas kalimat mengindikasikan diskriminasi terhadap suku, jenis kelamin, agama dan ras tertentu.



Sumber: Data Primer 2019

Hasil data pelanggaran iklan baris produk lembaga pendidikan dan lowongan kerja dalam koran Tribun Jogja menunjukkan bahwa pelanggaran Etika Pariwisata Indonesia penggunaan kalimat memiliki indikasi diskriminasi terhadap jenis kelamin merupakan pelanggaran paling banyak ditemui yaitu sebanyak 457 dari keseluruhan 770 iklan baris di Surat Kabar Harian Tribun Jogja. Diikuti dengan indikasi diskriminasi terhadap agama sebanyak 319 dari keseluruhan iklan baris dan indikasi terhadap budaya sebesar 1 pelanggaran.

C. Analisis Berdasarkan Objektivitas Surat Kabar Harian Tribun

Jogja

1. Iklan lembaga pendidikan dan lowongan kerja tidak boleh mengandung janji untuk memperoleh pekerjaan atau penghasilan tertentu.

Gambar 3. 13 Analisis berdasarkan penggunaan janji untuk memperoleh pekerjaan atau penghasilan tertentu



Sumber: Data primer, 2019

Berdasarkan analisis objektivitas dapat dijelaskan bahwa pelanggaran iklan baris produk lembaga pendidikan dan lowongan kerja dalam surat kabar harian Tribun Jogja edisi April 2019 menunjukkan pelanggaran Etika Pariwisata Indonesia penggunaan kalimat yang mengandung janji memperoleh pekerjaan atau penghasilan tertentu. Dari diagram di atas dapat dilihat persentase pelanggaran Etika Pariwisata Indonesia penggunaan kalimat

mengandung janji memperoleh penghasilan sebesar 94% dan mengandung janji memperoleh pekerjaan sebesar 6%.

Dari hasil persentase tersebut bisa dijelaskan bahwa Surat Kabar Harian Tribun Jogja melakukan pelanggaran beriklan yaitu pelanggaran Etika Pariwisata Indonesia penggunaan kata-kata yang mengandung janji didominasi dengan penggunaan kalimat mengandung janji penghasilan tertentu sebesar 94% atau sebanyak 657 dari jumlah sampel keseluruhan.

2. Iklan lowongan kerja tidak boleh secara berlebihan menjanjikan imbalan yang akan diperoleh.

Gambar 3. 14 Analisis berdasarkan penggunaan kalimat secara berlebihan menjanjikan imbalan yang akan diperoleh



Sumber: Data primer, 2019

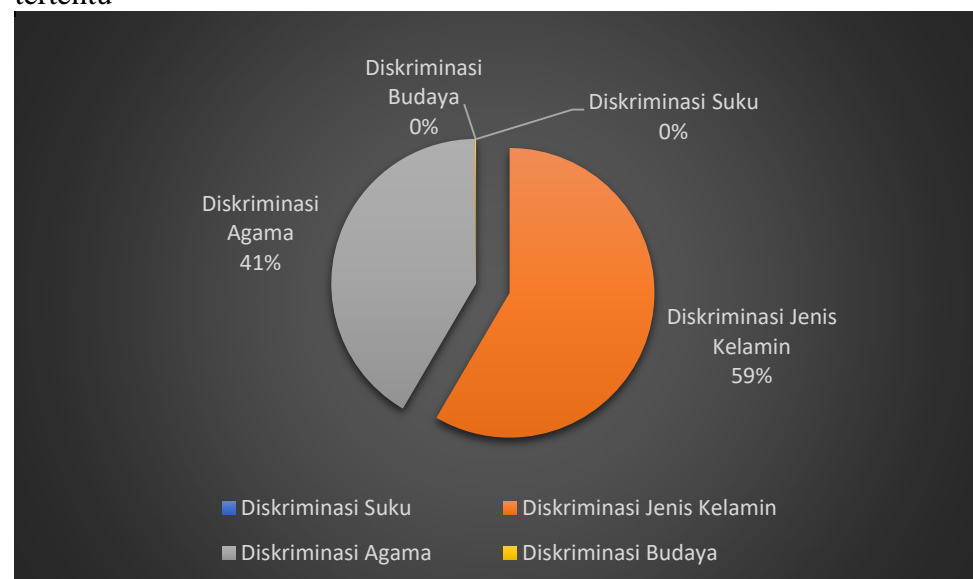
Berdasarkan analisis objektivitas dapat dijelaskan bahwa pelanggaran iklan baris produk lembaga pendidikan dan lowongan kerja dalam surat kabar harian Tribun Jogja edisi April 2019 menunjukkan pelanggaran Etika Pariwisata Indonesia penggunaan

kalimat yang mengandung janji memperoleh imbalan secara berlebihan. Dari diagram di atas dapat dilihat persentase pelanggaran Etika Pariwara Indonesia penggunaan kalimat mengandung janji memberikan imbalan secara berlebihan memperoleh hasil sebesar 100%.

Dari hasil persentase tersebut bisa dijelaskan bahwa Surat Kabar Harian Tribun Jogja melakukan pelanggaran beriklan yaitu pelanggaran Etika Pariwara Indonesia penggunaan kata-kata yang mengandung janji pemberian imbalan secara berlebihan sebesar 100% dari jumlah sampel keseluruhan.

3. Iklan lowongan kerja tidak boleh memberi indikasi adanya diskriminasi atas suku, jenis kelamin, agama, atau ras tertentu, kecuali jika secara khusus menyertakan alasan dibutuhkanannya suku, jenis kelamin, agama, atau ras tertentu tersebut.

Gambar 3. 15 Analisis berdasarkan penggunaan kalimat memberi indikasi adanya diskriminasi atas suku, jenis kelamin, agama, atau ras tertentu



Sumber: Data primer, 2019

Berdasarkan analisis objektivitas dapat dijelaskan bahwa pelanggaran iklan baris produk lembaga pendidikan dan lowongan kerja dalam surat kabar harian Tribun Jogja edisi April 2019 menunjukkan pelanggaran Etika Pariwara Indonesia penggunaan kalimat yang memberi indikasi adanya diskriminasi atas suku, jenis kelamin, agama, atau ras tertentu. Dari diagram di atas dapat dilihat persentase pelanggaran Etika Pariwara Indonesia penggunaan kalimat mengandung diskriminasi terhadap jenis kelamin sebesar 59% dan indikasi diskriminasi terhadap agama sebesar 41%.

Dari hasil persentase tersebut bisa dijelaskan bahwa Surat Kabar Harian Tribun Jogja melakukan pelanggaran beriklan yaitu pelanggaran Etika Pariwara Indonesia penggunaan kalimat memiliki indikasi diskriminasi terhadap jenis kelamin paling mendominasi dalam pelanggaran etika periklanan terhadap lowongan pendidikan dan lowongan kerja sebesar 59% dari jumlah sampel keseluruhan .

D. Uji Reliabilitas Surat Kabar Harian Tribun Jogja

Uji reliabilitas dilakukan berdasarkan definisi operasional yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk menilai konsistensi pengukuran data dan mengetahui tingkat objektivitas peneliti dalam pengkodean. Uji reliabilitas isi dilakukan pada sampel yang diperoleh dengan cara *random* dengan menggunakan teknik probability sampling dalam artian teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2015: 63). Sampel dalam penelitian ini adalah iklan baris

lowongan kerja dan lowongan pendidikan di Surat Kabar Harian Tribun Jogja edisi April 2019.

Untuk menguji reliabilitas menggunakan rumus Holsty atau biasa disebut dengan Fomula Holsti. Formula Holsti adalah uji reliabilitas antar-*coder* yang banyak dipakai selain persentase persetujuan. Reliabilitas ditunjukkan dalam persentase. Reliabilitas ditunjukkan dalam persentase persetujuan – berapa besar persentase persamaan antar-*coder* ketika menilai suatu isi. Rumus untuk menghitung reliabilitas adalah sebagai berikut (Eriyanto, 2011: 289-190):

Rumus Holsty adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

Dimana : CR : Coeficient Reliability,

M : *coding* yang sama (disetujui oleh masing-masing *coder*),

N1 : Jumlah *coding* yang dibuat oleh *coder* 1,

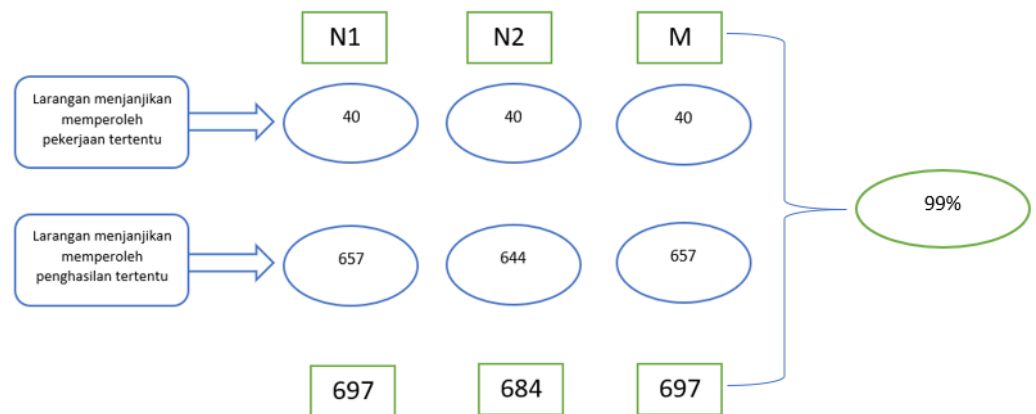
N2 : Jumlah *coding* yang dibuat oleh *coder* 2.

Dimana M adalah jumlah *coding* yang sama (disetujui oleh masing-masing *coder*). N1 adalah jumlah *coding* yang dibuat oleh *coder* 1, dan N2 adalah jumlah *coding* yang dibuat oleh *coder* 2. Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1, dimana 0 berarti tidak ada satu pun yang disetujui oleh para *coder* dan 1 berarti persetujuan sempurna di atara para *coder*. Semakin tinggi angka, maka semakin tinggi pula reliabilitas. Dalam rumus Holsty, angka reliabilitas minimum yang

ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya, jika perhitungan menunjukkan angka reliabilitas di atas 0,7, berarti alat ukur yang digunakan benar-benar reliabel. Tetapi jika dibawah 0,7 berarti alat ukur tidak reliabel (Eriyanto, 2011: 290). Berdasarkan operasionalisasi yang sudah ada, maka diperoleh hasil uji reliabilitas sebagai berikut:

1. Uji Reliabilitas Iklan lembaga pendidikan dan lowongan kerja tidak boleh mengandung janji untuk memperoleh pekerjaan atau penghasilan tertentu.

Gambar 3.16 Uji reliabilitas berdasarkan kalimat mengandung janji untuk memperoleh pekerjaan atau penghasilan tertentu



$$CR = \frac{2M}{N1 + N2} = \frac{2 \times 697}{697 + 684} = 0,99 = 99\%$$

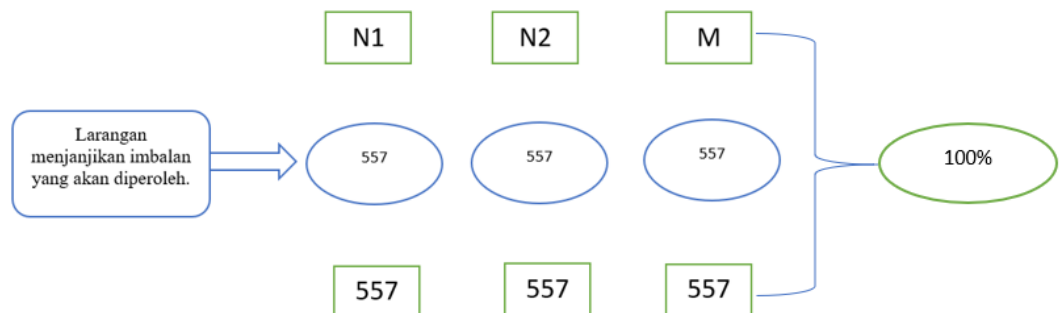
Hasil uji reliabilitas pelanggaran Etika Pariwisata Indonesia dalam Surat Kabar Harian Tribun Jogja pelanggaran penggunaan kalimat mengandung janji untuk memperoleh pekerjaan atau penghasilan tertentu mencapai 99%. Hasil ini menunjukkan bahwa antara pengkode 1 (N1) dan pengkode 2 (N2) tidak mendapatkan

kesulitan yang berarti sewaktu mengkode iklan lowongan pendidikan dan lowongan kerja dalam Surat Kabar Harian Tribun Jogja.

Berdasarkan gambar info grafis di atas pelanggaran Etika Pariwara Indonesia dalam iklan baris lowongan pendidikan dan lowongan kerja di surat kabar Harian Tribun Jogja paling banyak dilakukan pada penggunaan kalimat menjanjikan perolehan atau penghasilan tertentu sebanyak 657 dari jumlah sampel sebanyak 711 iklan baris lowongan pendidikan dan lowongan kerja dan dari jumlah keseluruhan pelanggaran kalimat mengandung janji untuk memperoleh pekerjaan tertentu 40 di Surat Kabar Harian Tribun Jogja edisi April 2019.

2. Uji Reliabilitas Iklan lowongan kerja tidak boleh secara berlebihan menjanjikan imbalan yang akan diperoleh.

Gambar 3.17 Uji reliabilitas berdasarkan kalimat tidak boleh secara berlebihan menjanjikan imbalan yang akan diperoleh.



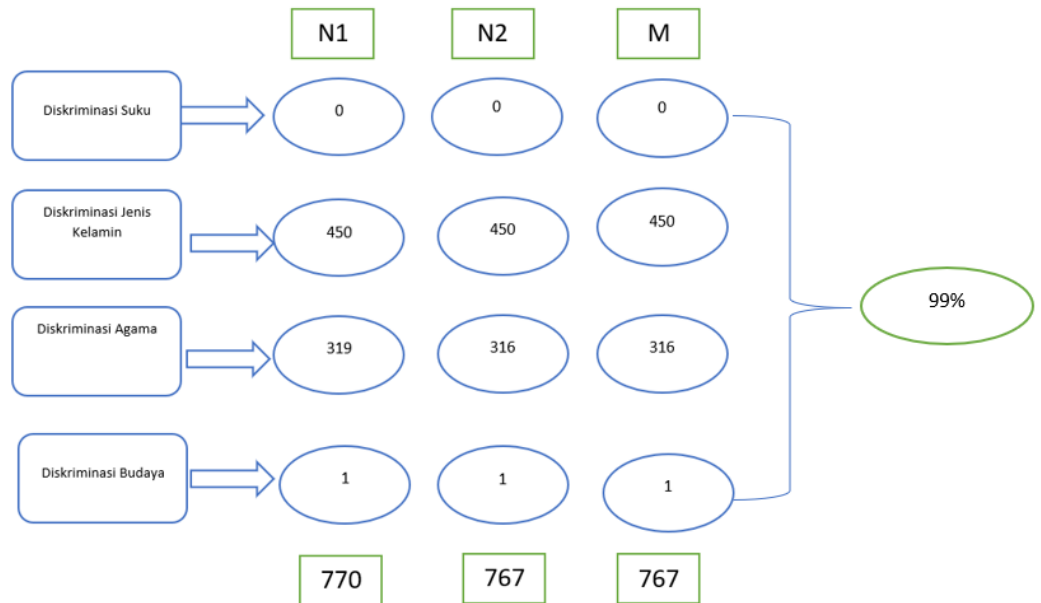
$$CR = \frac{2M}{N1 + N2} = \frac{2 \times 557}{557 + 557} = 1 = 100\%$$

Hasil uji reliabilitas pelanggaran Etika Pariwisata Indonesia dalam Surat Kabar Harian Tribun Jogja pelanggaran penggunaan kalimat secara berlebihan menjanjikan imbalan yang akan diperoleh mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa antara pengkode 1 (N1) dan pengkode 2 (N2) tidak mendapatkan kesulitan yang berarti sewaktu mengkode iklan lowongan pendidikan dan lowongan kerja dalam Surat Kabar Harian Tribun Jogja.

Berdasarkan gambar info grafis di atas pelanggaran Etika Pariwisata Indonesia dalam iklan baris lowongan pendidikan dan lowongan kerja di surat kabar Harian Tribun Jogja paling banyak dilakukan pada penggunaan kalimat menjanjikan secara berlebihan imbalan yang akan diperoleh sebanyak 557 dari jumlah sampel sebanyak 711 iklan baris lowongan pekerjaan dari jumlah keseluruhan pelanggar di Surat Kabar Harian Tribun Jogja edisi April 2019.

3. Uji Reliabilitas Iklan lowongan kerja tidak boleh memberi indikasi adanya diskriminasi atas suku, jenis kelamin, agama, atau ras tertentu, kecuali jika secara khusus menyertakan alasan dibutuhkanannya suku, jenis kelamin, agama, atau ras tertentu tersebut.

Gambar 3.18 Uji reliabilitas berdasarkan kalimat tidak boleh memberi indikasi adanya diskriminasi atas suku, jenis kelamin, agama, atau ras tertentu,



$$CR = \frac{2M}{N1 + N2} = \frac{2 \times 767}{770 + 767} = 0,99 = 99\%$$

Hasil uji reliabilitas pelanggaran Etika Pariwisata Indonesia dalam Surat Kabar Harian Tribun Jogja pelanggaran penggunaan kalimat-kalimat tidak boleh memberi indikasi adanya diskriminasi atas suku, jenis kelamin, agama, atau ras tertentu mencapai 99%. Hasil ini menunjukkan bahwa antara pengkode 1 (N1) dan pengkode 2 (N2) tidak mendapatkan kesulitan yang berarti sewaktu mengkode iklan lowongan pendidikan dan lowongan kerja dalam Surat Kabar Harian Tribun Jogja.

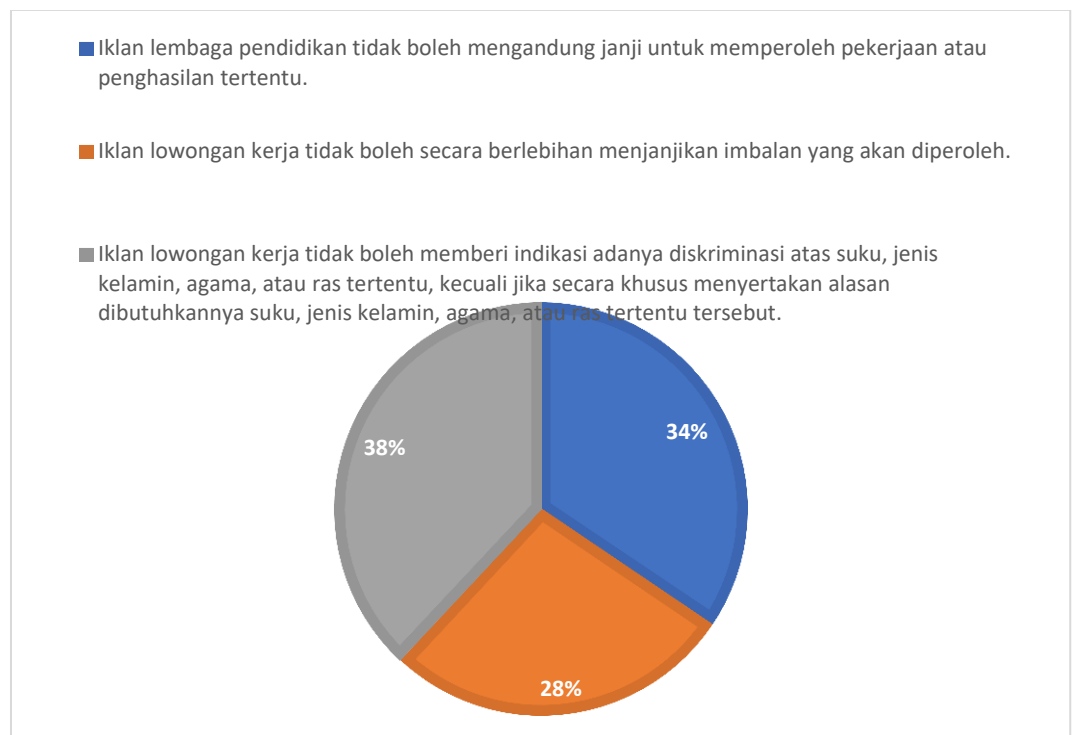
Berdasarkan gambar info grafis di atas pelanggaran Etika Pariwisata Indonesia dalam iklan baris lowongan pendidikan dan lowongan kerja di surat kabar Harian Tribun Jogja paling banyak dilakukan pada penggunaan kalimat diskriminasi terhadap jenis kelamin sebanyak 450 dari jumlah sampel sebanyak 711 iklan baris lowongan pendidikan dan lowongan kerja dan pelanggaran kalimat

mengandung diskriminasi terhadap agama sebanyak 316 pelanggaran di Surat Kabar Harian Tribun Jogja edisi April 2019.

E. Analisis Berdasarkan Pelanggaran EPI Pada Setiap Pasal

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pasal mana yang paling banyak melakukan pelanggaran Etika Pariwisata Indonesia dalam iklan baris lowongan pendidikan dan lowongan pekerjaan di Surat Kabar Harian Tribun Jogja, serta untuk mengetahui jumlah persentase dari setiap pasal yang melakukan pelanggaran Etika Pariwisata Indonesia dari jumlah keseluruhan sampel sebanyak 739 iklan baris lowongan pendidikan dan lowongan kerja.

Gambar 3.19 Persentase kesalahan EPI



Dari hasil analisis yang dilakukan maka diketahui bahwa pelanggaran Etika yang paling banyak dilakukan adalah Iklan lowongan

kerja tidak boleh memberi indikasi adanya diskriminasi atas suku, jenis kelamin, agama, atau ras tertentu, kecuali jika secara khusus menyertakan alasan dibutuhkannya suku, jenis kelamin, agama, atau ras tertentu tersebut. Dengan persentase sebesar 38% dari jumlah frekuensi sebanyak 770 dan dari jumlah keseluruhan sampel sebanyak 739 iklan baris lowongan pendidikan dan lowongan kerja di Surat kabar Harian Tribun Jogja Edisi April 2019.

Kedua, pelanggaran yang dilakukan dengan penggunaan Iklan lowongan kerja tidak boleh secara berlebihan menjanjikan imbalan yang akan diperoleh dengan persentase sebesar 34% dari jumlah frekuensi sebanyak 667 dan dari jumlah keseluruhan sampel sebanyak 739 iklan baris lowongan pekerjaan dan lowongan pendidikan di Surat kabar Harian Tribun Jogja Edisi April 2019.

Ketiga, pelanggaran yang dilakukan dengan Iklan lembaga pendidikan mengandung janji untuk memperoleh pekerjaan atau penghasilan tertentu dengan persentase sebesar 28% dari jumlah frekuensi sebanyak 697 dan dari jumlah keseluruhan sampel sebanyak 393 iklans lowongan pendidikan dan lowongan kerja di Surat kabar Harian Tribun Jogja Edisi April 2019.

Menurut peneliti pelanggaran tersebut terjadi dikarenakan mayoritas iklan lowongan kerja mengandung pernyataan janji terhadap suatu imbalan atau gaji dan kalimat yang mengandung diskriminasi. Pada pedoman kitab Etika Pariwisata Indonesia (EPI) terdapat pasal-pasal yang mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan periklanan khususnya di media cetak. Pasal-pasal yang digunakan dalam mengatur iklan pada media

cetak menjelaskan iklan tidak boleh menyebutkan iklan yang mengandung janji memberikan imbalan secara berlebihan, gaji tertentu dan indikasi diskriminasi terhadap suatu golongan suku, agama maupun budaya.

Tujuan periklanan umumnya mengandung misi komunikasi, yaitu suatu kegiatan untuk menarik khalayak, menanamkan informasi agar menghasilkan tindakan yang menguntungkan bagi pengiklan (Kasali, 2007:51). Pada umumnya tujuan beriklan adalah untuk mempromosikan produk atau jasa yang dimiliki, menginformasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat tahu keberadaannya. Namun masyarakat sebagai konsumen kini semakin pandai memilah dan menyikapi berbagai macam iklan yang mencoba untuk mempengaruhi. Masyarakat kian cerdas dalam menanggapi isi pesan yang terkandung dalam suatu iklan. Oleh sebab itu pihak iklan berusaha dengan berbagai cara agar iklan yang mereka sampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Pada dasarnya, bila masyarakat membutuhkan lowongan kerja sesuai yang diinginkannya, maka mereka akan menyesuaikan lowongan kerja mana yang akan dilamarnya. Oleh karena itu, etika periklanan kembali kepada sifatnya yang self regulation tersebut. Maraknya media cetak lokal yang berbeda di tiap daerah, berpengaruh terhadap kemunculan iklan-iklan di media lokal tersebut. Sehubungan dengan hal ini, serta adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota perlu dilibatkan dalam kebijakan yang terkait dengan periklanan di daerahnya. Padahal periklanan justru banyak ditemukan melalui media lokal baik cetak maupun elektronik. Tim pengawasan iklan yang telah terbentuk di tingkat pusat tentu tidak akan

sanggup mengawasi seluruh iklan yang terpasang di media di seluruh Indonesia.